

# **TIMUR TENGAH PASCA-REVOLUSI**

**Islamisme, Demokrasi, Konflik Israel-Palestina, dan Globalisasi  
Terorisme**

Oleh:

**Zuhairi Misrawi**

disampaikan dalam seminar  
“Peranan Indonesia dalam Upaya Perdamaian di Timur Tengah”

yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)  
bekerjasama dengan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Yogyakarta, 14 April 2016**



# Timur Tengah Pasca-Revolusi

## Islamisme, Demokrasi, Konflik Israel-Palestina, dan Globalisasi Terorisme

Zuhairi Misrawi

Di penghujung abad ke-19, Abdurrahman al-Kawakibi (1849-1902) melakukan kritik yang sangat mendasar terhadap Dinasti Ottoman dalam karyanya yang sangat populer di dunia Islam, *Thaba'i al-Istibdad wa Mashari' al-Isti'bad*. Karya ini mengisahkan tentang perilaku politik para penguasa Dinasti Ottoman yang otoriter dan represif terhadap rakyatnya.<sup>1</sup> Perilaku otoritarianistik para penguasa semakin telanjang dengan menggunakan berbagai modus, sehingga menciptakan keprihatinan yang sangat mendalam. Konsekuensinya, dunia Islam berada dalam siklus kebangkrutan moral, yang menyebabkan Dinasti Ottoman berada di ambang kehancuran.

Dua puluh tahun setelah *mognum opus* al-Kawakibi diluncurkan, Dinasti Ottoman luluh lantah. Dunia Islam mengakhiri sistem khilafah yang sudah berlangsung kurang lebih 12 abad lamanya. Umat Islam hampir tidak percaya dengan kenyataan tersebut, karena secara kuantitas umat Islam sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tetapi, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Khaldun (1332-1406) dalam *al-Muqaddimah*, sebuah peradaban akan mengalami siklus kebangkitan dan kejatuhan,<sup>2</sup> maka Dinasti Ottoman harus menjemput ajalnya sebagai akhir dari ideologi khilafah.

Setidaknya ada tiga respons dunia Islam terhadap kejatuhan Dinasti Ottoman: Pertama, respons yang bersifat sekularistik. Turki sebagai pusat pemerintahan Dinasti Ottoman merupakan pihak yang merasakan langsung pahitnya kediktatoran rezim yang dibalut dengan jubah agama. Mustafa Kemal Attaturk (1881-1938) memilih memutuskan hubungan dengan kekuasaan yang berlandung di bawah jubah agama sembari menjadikan sekularisme sebagai ideologi politik mereka. Ia trauma dengan sistem totaliter yang telah menjadikan agama sebagai justifikasi dan legitimasi kekuasaan Dinasti Ottoman.

Kedua, respons yang bersifat formalistik. Kelompok ini menganggap kejatuhan Dinasti Ottoman, karena mereka telah keluar dari "poros agama", sehingga menyebabkan kebangkrutan moral. Karena itu, mereka memilih untuk kembali ke agama dengan menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Hasan al-Banna (1906-1949) adalah sosok yang

---

<sup>1</sup>Abdurrahman al-Kawakibi, *Thabai' al-Istibdad wa Mashari' al-Isti'bad*, (Damaskus: al-Awail, 2003), hlm. 23. Menurut Rone Raz dalam "Interpretation of Kawakibi's Thought, 1950-1980s", *Middle Eastern Studies*, 32 (January, 1996): hlm. 179, bahwa kritik pedas terhadap otoritarianisme Dinasti Ottoman telah menyebabkan Kawakibi melakukan migrasi dari Aleppo ke Kairo. Pada zamannya, pemikiran Kawakibi mencerminkan revolusi.

<sup>2</sup>Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1995), hlm. 9

sangat menonjol dalam membangun ideologi “negara-agama” dan “Pan-Islamisme” sebagai perlawanan terhadap Barat. Untuk memuluskan ideologi tersebut, Hasan al-Banna mendeklarasikan berdirinya Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928.

Ketiga, respons yang bersifat komplementaristik. Kelompok ini memilih jalan tengah dari kedua respons tersebut dengan mengakomodasi sekularisme di satu sisi dan mengakomodasi nilai-nilai universal agama dalam konstitusi. Sukarno (1901-1970) merupakan sosok yang menonjol dalam melahirkan sebuah ideologi yang mampu menggabungkan sekularisme dan agama di bawah bendera Pancasila.

Dari ketiga respons tersebut, Timur-Tengah merupakan salah satu negara yang saat ini menghadapi masalah serius dalam ranah politik. Sejak jatuhnya Dinasti Ottoman di Turki, mereka dihadapi pada tarik-menarik dan pertarungan ideologis yang tiada henti. Timur-Tengah digambarkan oleh sejumlah pakar sebagai *theatre of conflict*.<sup>3</sup> Kepentingan politik luar negeri cukup memberikan pengaruh yang sangat luar biasa akibat kolonialisme yang terus bertengger hingga sekarang ini. Tumbuhnya ideologi Pan-Islamisme yang terus menguat di Timur-Tengah sejak awal tahun 20-an tidak bisa dipisahkan dari konteks kolonialisme yang menancapkan taringnya sejak abad ke-18.

Deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948 atas prakarsa Inggris melalui Deklarasi Balfour semakin melambungkan ideologi perlawanan terhadap Barat. Bahkan untuk melanggengkan misinya, Barat berkoalisi dengan rezim-rezim otoriter. Langkah tersebut sejauh ini relatif berhasil dalam mengamankan kepentingan Israel di Timur-Tengah.

Namun, revolusi yang bergelayut di Tunisia pada awal tahun 2011, lalu merambah ke Mesir, Libya, Yaman, Suriah, Bahrain, Arab Saudi, dan Kuwait telah melahirkan zaman baru di Timur-Tengah. Rezim-rezim otoriter yang begitu *powerful* menancapkan taring kekuasaannya di Timur-Tengah harus mengakhiri kekuasaan dan ajalnya secara tidak terhormat. Zein Abidin Ben Ali di Tunisia yang berkuasa dari tahun 1987-2011 harus diekstradisi ke Arab Saudi, Hosni Mubarak yang berkuasa dari tahun 1981-2011 dipaksa mengundurkan diri dan hidup di kasur pesakitan, Moammar Qaddafi yang berkuasa dari tahun 1969-2011 dibunuh secara tidak terhormat oleh rakyatnya sendiri, dan Ali Abdullah Saleh yang berkuasa dari tahun 1978-2011 mengundurkan diri dan dibom oleh oposisi. Sedangkan rezim Bashar al-Assad masih menunggu giliran kejatuhannya, cepat atau lambat. Pertanyaannya, apa saja dampak-dampak yang akan terjadi pasca-jatuhnya rezim-rezim otoriter tersebut? Siapa aktor politik pasca-revolusi? Bagaimana masa depan Timur-Tengah pasca-revolusi? Apa dampaknya bagi keamanan global?

## Islamisme

Salah satu problem dalam implementasi demokrasi liberal di dunia Islam, khususnya Timur-Tengah dan Afrik Utara, yaitu menguatnya kelompok Islamis. Bahkan, musim semi

---

<sup>3</sup>Azzedine Layachi, *Global Studies: The Middle East*, (New York: McGraw-Hill, 2011), hlm. 4-18.

politik yang berhembus di dunia Arab, bukanlah “musim semi Arab” (*Arabs Spring*), melainkan “musim semi kaum Islamis” (*Islamists Spring*).

Di satu sisi, fenomena tersebut menimbulkan sebuah harapan tentang transformasi demokrasi, yang akan melahirkan sebuah perubahan besar tentang pemaknaan dan penghayatan terhadap demokrasi. Tetapi, di sisi lain dikhawatirkan dapat menimbulkan munculnya arus balik tentang lahirnya demokrasi versi kaum Islamis. Yaitu, ketika demokrasi hanya dibajak secara prosedural, tetapi substansinya dikosongkan dari nilai-nilai universal yang inheren di dalam paradigma demokrasi liberal.

Kekhawatiran tersebut beralasan, karena kaum Islamis bukanlah entitas yang baru dalam pengalaman demokrasi di dunia Islam, khususnya di Timur-Tengah dan Afrika Utara. Mereka mempunyai pengalaman dalam berbagai sistem pemerintahan, baik demokrasi, sosialisme, monarki, komunisme dan otoritarianisme. Mereka relatif bisa bertahan dalam situasi apapun, karena mempunyai ideologi dan komunitas yang mapan.<sup>4</sup>

Menurut Jon Armanjani (2012), setidaknya ada empat hal yang dijadikan pijakan oleh kalangan Islamis: Pertama, prinsip-prinsip keislaman harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik secara personal maupun kolektif. Kedua, Islam adalah agama yang menekankan pentingnya keyakinan, sedangkan keyakinan agama lain mengandung kesalahan atau keabasahan yang terbatas. Ketiga, hukum-hukum tradisional Islam harus mengatur masalah relasi seksual. Keempat, budaya Barat dan sekular hanya mempromosikan budaya konsumerisme dan hidup bebas yang bertentangan dengan Islam.<sup>5</sup>

Pandangan kalangan Islamis tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar, selain karena peran-peran kultural yang dilakukan dalam gerakan mereka, mereka mempunyai konsen dalam ranah politik. Kalangan Islamis mempunyai pemikiran politik yang bersifat distingtif, yaitu paradigma Islam sebagai agama dan negara (*al-Islam Din wa al-Dawlah*),<sup>6</sup> Paradigma ini mempunyai pengaruh besar dalam rangka lahirnya sebuah paradigma politik yang bernuansa keislaman.

Secara historis harus diakui, bahwa paradigma Islam sebagai agama dan negara hakikatnya merupakan diskursus yang relatif modern. Sejumlah tokoh muslim yang mempopulerkan paradigma tersebut, antara lain: Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1787), Jamaluddin al-Afghani (1838), Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Rashid Ridha (1865-1935), Hasan al-Banna (1906-1949), Sayyid Qutb (1906-1966), Sayyid Abu al-A’la al-Mawdudi (1903-1979).

---

<sup>4</sup>Carrie Rosefsky Wickham, *Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt*, (New York: Colombia University Press, 2002), hlm.

<sup>5</sup>Jon Armanjani, *Modern Islamist Movements: History, Religion, and Politics*, (United Kingdom: Wiley Blackwell, 2012), hlm. 1

<sup>6</sup>John L. Esposito and John O. Voll, *Islam and Democracy*, (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 4. Lihat juga, Arthur Godschmidt, *A Concise History of the Middle East*, (Boulder: Westview Press, 1998).

Tokoh-tokoh tersebut telah melahirkan inspirasi untuk membentuk negara yang berdasarkan Syariat. Secara spesifik, ideologi yang dibangun sebagai berikut:

1. Syariat harus mengatur seluruh aspek dari kehidupan di negara-negara Muslim.
2. Setiap pemerintahan harus mampu mewujudkan seorang muslim yang paripurna, yaitu muslim yang patuh menjalan rukun Islam dan mempunyai keyakinan yang sesuai dengan rukun Iman.
3. Pemerintahan dapat dicapai melalui mekanisme demokratis atau melalui sistem monarki yang dipimpin oleh seorang *amir* yang dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi.
4. Pemerintahan yang berdasarkan Islam tersebut harus memberikan dukungan finansial dan politik terhadap sekolah dan perguruan tinggi Islam, serta membunuhanguskan keberadaan sistem pendidikan lainnya.
5. Pemerintahan harus mewajibkan kepada lembaga pendidikan untuk mengajarkan al-Quran, hadis, syariat, bahasa Arab dan sejarah Islam. Di samping itu, juga mengajarkan matematika, sains, dan ilmu-ilmu sosial.
6. Pemerintahan harus menjamin terjaganya basis moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal pakaian, pergaulan, minuman, kebudayaan, sistem ekonomi, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Beberapa pandangan yang melekat pada diri kalangan Islamis tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan, terkait dengan kompatibilitas antara Islamisme dan demokrasi. Demokrasi liberal menganut prinsip kesetaraan dengan menjadikan kewarganegaraan sebagai landasannya. Faktanya, Timur-Tengah dan Afrika Utara sebagai basis tumbuhnya agama-agama semitis, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, telah membuktikan bahwa mereka yang tinggal di kawasan ini tidak mempunyai latarbelakang agama yang bersifat monolitik.

Di Mesir, selain umat Islam sebagai kelompok mayoritas, juga terdapat kelompok minoritas, seperti Kristen Koptik, Protestan, Katolik, Bahai dan Yahudi. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin Syariat Islam dijadikan sebagai landasan konstitusional dalam sebuah negara yang menganggap dirinya demokratis? Apakah praktek tersebut dapat dianggap telah menjalankan demokrasi liberal?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dicermati untuk melihat, apakah Islamisme mempunyai intensi terhadap demokrasi liberal atau mereka hanya menjadikan demokrasi untuk mencapai cita-cita politik mereka, yaitu Islam sebagai agama dan negara?

Arab Saudi merupakan sebuah pemandangan yang menarik dalam mencermati salah satu potret Islamisme, yang secara eksplisit tidak kompatibel dengan demokrasi. Arab Saudi merupakan salah satu contoh di mana Syariat Islam menjadi konstitusi, yang mandatnya diberikan kepada Raja dan lembaga fatwa keagamaan untuk memaksakan kepada setiap

---

<sup>7</sup>Jon Armanjani, *Modern Islamist Movements: History, Religion, and Politics*, (United Kingdom: Wiley Blackwell, 2012), hlm. 21-22.

warganya. Arab Saudi merupakan negara yang menerapkan hukum Islam secara penuh dan menolak konvensi hak asasi manusia.

Berbeda dengan Arab Saudi, Mesir relatif mengalami transformasi yang menarik perihwal upaya untuk mempertemukan antara Islamisme dan demokrasi. Pasca-tumbangnya rezim Hosni Mubarak, Ikhwanul Muslimin tumbuh sebagai kekuatan yang hendak memberikan warna lain terhadap demokrasi. Ikhwanul Muslimin merumuskan sebuah paradigma baru, yaitu negara modern dengan menjadikan Islam sebagai rujukannya (*al-dawlah al-madaniyyah bi al-marja' iyyah al-Islamiyyah*).<sup>8</sup> Harus diakui, bahwa paradigma politik ini telah mengalami metamorfosa dari paradigma politik yang dikembangkan oleh Hasan al-Banna sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin.

Menurut Muhammad Badi', Pimpinan Tertinggi Ikhwanul Muslimin, bahwa paradigma negara demokratis dengan Islam sebagai rujukan utamanya merupakan implementasi dari ayat al-Quran dalam surat al-An'am ayat 162-163, yang berbunyi, "Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan kematianku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan atas dasar itu aku diperintahkan dan aku adalah pemuka umat Islam." Sedangkan hal-hal terperinci dalam kehidupan harus mengacu pada kepentingan umum yang ditentukan oleh umat dan *ahl al-hall wa al-'aqd*, yang merepresentasikan umat untuk melaksanakan perintah Allah, sesuai dengan prinsip, "hendaklah kalian memecahkan segala urusan dengan cara musyawarah" (QS. al-Syura: 38).<sup>9</sup>

Secara eksplisit, pandangan tersebut hendak menggabungkan antara dimensi "sakral" yang bersumber dari agama dengan dimensi "profan" yang bersumber dari musyawarah. Paradigma ini dianggap dapat mengakomodasi prinsip Syariat sekaligus memberikan ruang kepada rakyat untuk menentukan kebijakan yang mencerminkan kemaslahatan umum.

Esam el-Eryan secara khusus menegaskan, "Islam adalah sistem yang paripurna yang meliputi seluruh fenomena kehidupan secara umum. Islam adalah agama dan bangsa, pemerintahan dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih-sayang dan keadilan, kebudayaan dan undang-undang, ilmu dan hukum, materi dan harta, usaha dan kaya, jihad dan dakwah, tentara dan pemikiran, sebagaimana di dalamnya terkandung akidah yang benar dan ibadah yang sah."<sup>10</sup>

Berkaitan dengan Syariat, el-Eryan menegaskan, "Syariat Islam adalah Syariat yang paripurna, yang di dalamnya mengatur prinsip-prinsip hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya, manusia dengan keluarganya, manusia dengan

---

<sup>8</sup>Esham al-Eryan, *Al-Ikhwān al-Muslimūn wa al-Dawlah al-Madaniyyah* (Kairo: Markaz al-'Ilam al-'Arabi, 2011), 4.

<sup>9</sup>Esham al-Eryan, *Al-Ikhwān al-Muslimūn wa al-Dawlah al-Madaniyyah* (Kairo: Markaz al-'Ilam al-'Arabi, 2011), 8.

<sup>10</sup>Esham al-Eryan, *Al-Ikhwān al-Muslimūn wa al-Dawlah al-Madaniyyah* (Kairo: Markaz al-'Ilam al-'Arabi, 2011), 15.

masyarakatnya, manusia dan lingkungannya yang lebih besar, serta manusia dengan lingkungannya yang lebih luas.”<sup>11</sup>

Sebagai konsekuensi dari pandangan tersebut, maka Ikhwanul Muslimin merumuskan konsepsi “Negara Islam”, yaitu “Negara yang modern”.<sup>12</sup> Setidaknya ada beberapa modus yang hendak diformulasikan dengan konsepsi tersebut: Pertama, negara konsensus-konstitusional. Hal ini mengacu pada pengalaman sejarah Nabi Muhammad yang telah merumuskan konsensus yang merupakan konsensus antara pemimpin dan umat. Kedua, negara yang menjamin kesetaraan dalam payung kewarganegaraan. Perbedaan agama dan keyakinan harus melebur dalam semangat kebangsaan. Ketiga, negara representatif-parlementer, yang meniscayakan adanya perwakilan rakyat yang tujuannya menyusun kebijakan dan melakukan kontrol terhadap eksekutif. Keempat, negara pluralisme, yang melindungi keanekaragaman kelompok, baik muslim maupun non-muslim. Kelima, negara yang menjamin pergantian kekuasaan. Keenam, negara yang menganut pembagian kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun militer agar melakukan tugas sesuai fungsinya masing-masing. Ketujuh, negara hukum yang mengutamakan keamanan dan ketertiban umum.<sup>13</sup>

Jika melihat penjelasan ini, maka secara substansial dapat dipahami bahwa Ikhwanul Muslimin hakikatnya telah menerima sistem demokrasi liberal dengan menjadikan Islam dan Syariat sebagai sumber utama. Tapi pertanyaannya, bagaimana hal tersebut bisa diwujudkan di tengah polarisasi pandangan keislaman dan realitas sosial-politik yang tidak monolitik. Mesir bukan hanya terdiri dari satu kelompok agama saja, melainkan juga terdapat kelompok dari agama selain Islam. Mereduksi sistem pemerintahan yang hanya menganut pada satu sumber agama hakikatnya telah melakukan tindakan diskriminatif. Hal tersebut berpotensi pada hilang hak-hak sipil kalangan non-muslim.

Di samping itu, Ikhwanul Muslimin tidak secara eksplisit menggunakan istilah demokrasi. Mereka hanya menggunakan istilah “Negara-Sipil” (*al-dawlah al-madaniyyah*), karenanya dapat dipahami, bahwa Ikhwanul Muslimin masih mempunyai keengganan untuk menggunakan istilah demokrasi. Bahkan, dalam sebuah kampanye pemilu Presiden, Ikhwanul Muslimin secara eksplisit berjanji akan menerapkan hukum Islam sesuai al-Quran dan Sunnah. Slogan “Islam sebagai sebuah solusi” (*al-Islam huwa al-Hall*) senantiasa mengemuka.

Dengan demikian, Islamisme dan demokrasi merupakan dua entitas yang masih berseberangan. Adanya sikap adaptif terhadap demokrasi sebagaimana ditunjukkan Ikhwanul

---

<sup>11</sup>Esham al-Eryan, *Al-Ikhwān al-Muslimīn wa al-Dawlah al-Madaniyyah* (Kairo: Markaz al-‘I‘lam al-‘Arabi, 2011), 17.

<sup>12</sup>Esham al-Eryan, *Al-Ikhwān al-Muslimīn wa al-Dawlah al-Madaniyyah* (Kairo: Markaz al-‘I‘lam al-‘Arabi, 2011), 32.

<sup>13</sup>Esham al-Eryan, *Al-Ikhwān al-Muslimīn wa al-Dawlah al-Madaniyyah* (Kairo: Markaz al-‘I‘lam al-‘Arabi, 2011), 32-45.

Muslimin pasca-revolusi dapat dipahami sebagai upaya untuk merespons aspirasi publik yang menghendaki demokratisasi. Tetapi, harus diakui, Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok yang mempunyai ide-ide Islamisme, sebagaimana Arab Saudi masih mempunyai sejumlah keberatan untuk menggunakan istilah demokrasi. Mereka terlibat dalam pemilu sebagai bentuk akseptabilitas terhadap demokrasi elektoral. Tetapi, saat berkaitan dengan demokrasi liberal yang menjamin kesetaraan dalam kewarganegaraan, maka di sinilah letak problematisnya, karena kelompok Islamis hanya menjadi Islam sebagai satu-satunya sumber perundang-undangan, meskipun mereka membuka pintu konsultasi (*syura*).

## Demokrasi

Meskipun demikian, tuntutan utama di balik revolusi yang bergelayut di Timur-Tengah yaitu demokratisasi. Pesan utamanya, yaitu pergantian kekuasaan secara teratur serta pemilihan umum yang transparan dan bersih. Rakyat ingin memiliki kedaulatan hukum dan politik, yang direspresentasikan oleh wakil mereka di parlemen. Untuk mewujudkan hal tersebut, rakyat menuntut agar diberi kebebasan dan kesempatan yang setara untuk mendirikan partai politik. Lalu, mereka bersaing secara *fair* dalam pemilu.

Dari pemilu yang digelar oleh dua negara yang disapu angin revolusi, yaitu Tunisia dan Mesir, hasil pemilu mengejutkan banyak pihak. Di Tunisia, Partai Ennahda yang berafiliasi pada kelompok Islam moderat memenangkan pemilu dengan perolehan suara 41%. Memang tidak terbayangkan sebelumnya, karena Tunisia dikenal dengan negara Arab yang paling liberal serta mengadopsi sekularisme dan menegakkan kesetaraan jender. Namun, saat pemilu yang bersih dan transparan dilakukan pasca-revolusi, maka yang memenangkan pemilu justru kaum Islamis.

Kemenangan Ennahda membuktikan, bahwa kubu Islamis di Tunisia mendapatkan sambutan publik yang sangat luar biasa, karena mereka mempunyai program dan jaringan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Sementara kelompok liberal dan kiri cenderung merupakan gerakan elite yang hanya tumbuh di perkotaan dan kelas menengah, yang tidak mengakar di kalangan masyarakat bawah.

Meskipun demikian, satu hal yang menarik dari kubu Islamis di Tunisia, bahwa mereka tidak tertarik untuk mengusung ideologi Islam dalam ranah politik. Mereka cenderung konsern pada perbaikan di sektor ekonomi dan pembangunan. Mereka sejak awal ingin belajar dari AKP di Turki, yang berhasil menjadikan Turki sebagai negara muslim paling demokratis dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat mengangumkan.

Fenomena tersebut juga terjadi di Mesir. Revolusi 25 Januari di Mesir telah berhasil melaksanakan dua misi utamanya, yaitu menumbangkan rezim Hosni Mubarak dan melaksanakan pemilu paling demokratis sejak tahun 1984. Namun, hasil pemilu yang digelar 28 November lalu sangat mencengangkan banyak pihak, karena kubu Islamis berhasil

mendulang suara yang relatif signifikan dalam pemilu perlemen putaran pertama, sekitar 60% suara.

Partai Kebebasan dan Keadilan yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin mendapatkan 36,6% suara, sedangkan Partai Nour yang berafiliasi pada kubu salafi mendapatkan sekitar 24,4 % suara. Meskipun sekitar dua pertiga rakyat Mesir belum menentukan pilihan, karena 18 provinsi belum menentukan pilihan mereka, tetapi naiknya elektabilitas kubu Islamis mendapat perhatian luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Ada tiga hal penting yang dapat menjelaskan di balik unggulnya kubu Islamis: Pertama, kemenangan kubu Islamis di beberapa negara Arab pasca-revolusi. Kemenangan Partai Ennahda di Tunisia serta Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko. Kemenangan partai-partai tersebut memberikan amunisi psikologis yang sangat luar biasa kepada kubu Islamis di Mesir untuk menyongsong kemenangan pemilu. Bahkan, kubu Islamis diprediksi akan memenangi pemilu di Libya, Yaman, dan Suriah.

Kedua, kubu Islamis mempunyai basis massa yang riil. Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan keagamaan yang mempunyai akar historis yang kuat. Didirikan pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna, dan berkembang menjadi kekuatan perlawanan terhadap Barat dengan ideologi Pan-Islamisme. Meskipun Ikhwanul Muslimin kerap kali diperlakukan secara represif oleh rezim Gamal Abdul Nasser (1952-1970), Anwar Sadat (1970-1981), dan Hosni Mubarak (1981-2011), tetapi mereka konsisten dengan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan filantropi. Sejak tahun 50-an rezim yang berkuasa telah berhasil meredam kekuatan politik Ikhwanul Muslimin, tetapi harus diakui mereka tidak mampu memangkas hubungan garis vertikal antara Ikhwanul Muslimin dengan basis massa. Ikhwanul Muslimin telah berhasil menggunakan kampus dan masjid sebagai medium untuk konsolidasi gerakan mereka.

Ketiga, kubu liberal dan kubu kiri terbukti tidak mempunyai basis yang mengakar kuat. Sebelum pemilu berlangsung, mereka diperkirakan akan memberikan perlawanan yang serius terhadap kekuatan kubu Islamis, karena kekuatan mereka disebut-sebut sebagai sebagai *al-aghlabiyyah al-shamitah* (mayoritas diam). Salah satu indikatornya, karena selama 30 tahun berkuasa, Hosni Mubarak telah berhasil menanamkan nilai-nilai sekular bagi rakyat Mesir dengan pandangan keagamaan yang moderat. Tetapi, hasil pemilu awal telah menyatakan sebaliknya, bahwa Hosni Mubarak tidak hanya gagal dalam membangun pemerintahan yang demokratis, tetapi juga gagal dalam rangka membangun ideologi kebangsaan yang meniscayakan kesetaraan dalam prinsip kewarganegaraan. Husein Haikal menggambarkan demokrasi ala Mubarak ibarat kolam ikan yang kering, tidak ada air dan ikan di dalamnya. Demokrasi tanpa ideologi, sistem, dan pemerintahan demokratis.<sup>14</sup>

Demokrasi di Mesir memasuki babak baru. Ikhwanul Muslimin dan kaum salafi tampil sebagai kekuatan yang meyakinkan dalam panggung politik pasca-revolusi. Meskipun

---

<sup>14</sup>Lihat wawancara Muhammad Husein Haikal di Harian Mishr al-Youm pada tanggal 28 Januari 2011.

demikian, Ikhwanul Muslimin sebagai pemenang pemilu tidak akan mudah melaksanakan misinya untuk mengawal demokrasi. Sejak pengumuman hasil pemilu putaran pertama, Ikhwanul Muslimin sudah mendapatkan penolakan dari kaum salafi. Pertentangan kubu Ikhwanul Muslimin dan kaum salafi bermula pada tahun 80-an ketika Ikhwanul Muslimin masuk ke ranah politik praktis dan bermetamorfosa menjadi partai politik. Kaum salafi mengeluarkan fatwa “kafir” terhadap Ikhwanul Muslimin. Sedangkan kaum salafi pada masa itu memilih untuk setia pada rezim yang berkuasa. Beberapa tokoh salafi yang menentang keras Ikhwanul Muslimin, yaitu Abu Ishaq al-Huwayni, Nasiruddin al-Albani, Moqbil al-Wadi’i, dan lain-lain. Mereka menentang keras langkah yang diambil Ikhwanul Muslimin dalam ranah politik praktis.

Pertentangan Ikhwanul Muslimin dengan kaum salafi berlanjut pasca-pemilu parlemen putaran awal. Pasalnya, Ikhwanul Muslimin menegaskan, bahwa mereka tidak tertarik dengan isu formalisasi Syariat dalam konstitusi baru Mesir. Mereka justru akan fokus pada upaya membangun solidaritas kebangsaan dan memperbaiki sektor ekonomi yang turun drastis sejak revolusi berlangsung. Essam El-Arian (2011), salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin dalam tulisannya di Harian *Guardian* menegaskan bahwa pihaknya memilih untuk menjaga momentum demokrasi sebagai jembatan untuk membangun perekonomian serta merestorasi kekuatan Mesir di dunia Arab.<sup>15</sup>

Bahkan, Ikhwanul Muslimin menyampaikan ketidaktertarikannya dengan agenda politik formalistik kaum salafi. Mereka cenderung memilih untuk melanjutkan koalisi yang dibangun dengan faksi moderat, liberal, dan kiri dengan payung “koalisi demokratis” (*al-tawafuq al-dimograty*) daripada berkoalisi dengan kaum salafi.

Langkah yang diambil Ikhwanul Muslimin cukup taktis, karena ingin memberikan garansi pada kaum muda yang telah berjasa dalam mewujudkan revolusi, bahwa mereka konsisten untuk melanjutkan agenda revolusi. Tanpa peran kaum muda yang berhasil menggulingkan rezim totaliter Hosni Mubarak, Ikhwanul Muslimin tidak akan menikmati kue kekuasaan di parlemen, sebagaimana tercermin dalam hasil pemilu tahap pertama.

Maka dari itu, Ikhwanul Muslimin harus mengikuti kehendak “parlemen lapangan Tahrir”, yang dimotori oleh kaum muda yang tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Salah satu agenda yang harus dijawab oleh Ikhwanul Muslimin yaitu perihal peralihan kekuasaan dari militer ke sipil. Beberapa hari sebelum pemilu dilangsungkan, Ikhwanul Muslimin menolak untuk bersama kaum muda dan memilih untuk mendukung militer. Hal ini menjadi agenda yang harus diperhatikan oleh mereka agar momentum revolusi dan demokrasi mendapatkan dukungan dari partai politik koalisi demokrasi dan kaum muda.

Sayangnya, Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah kekuatan politik terbesar di Mesir tidak bisa bertahan lama karena mereka ingin memonopoli kekuasaan, baik eksekutif maupun

---

<sup>15</sup>Lihat Essam El Arian, *Egypt is the true victor in this election*, Harian The Guardian, UK, 30 November 2011.

legislatif. Di samping itu, Ikhwanul Muslimin berusaha memaksakan konstitusi baru Mesir yang disinyalir sangat diskriminatif dan tidak sesuai dengan pluralitas warga Mesir.

Konsekuensinya, Ikhwanul Muslim digulingkan dari kursi kekuasaan melalui kudeta militer dengan mandat langsung dari rakyat. Bahkan, tidak hanya itu saja, Ikhwanul Muslimin resmi menjadi “organisasi terlarang”, karena ditengarai sebagai aktor di balik berbagai aksi terorisme yang terjadi di Mesir pasca-lengsernya Muhammad Mursi.

Naiknya kubu Islamis dalam panggung politik pasca-revolusi telah menimbulkan harapan sekaligus ancaman bagi demokrasi. Di satu sisi demokrasi telah membuka ruang agar kubu Islamis berpartisipasi dalam politik-praktis, bahkan meraih dukungan publik yang sangat massif. Tetapi di sisi lain, partisipasi kaum Islamis dalam politik praktis meninggalkan persoalan serius perihal ketidakmampuan mereka dalam membangun rekonsiliasi nasional, khususnya dalam membentuk konstitusi yang mampu melindungi dan merangkul semua kelompok agama, suku, dan sayap politik.

Pengalaman Tunisia memberikan harapan yang sangat baik, karena kubu Islamis yang dikomandoi oleh Ennahda mau merangkul seluruh kelompok, khususnya sayap kanan dan sayap kiri dengan membentuk konstitusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kewarganegaraan. Bahkan mereka mambagi kekuasaan dengan berbagai kelompok yang lain. Masalahnya, Tunisia saat ini sedang berjuang menghadapi tantangan dari kelompok Salafi dan kelompok ekstremis yang terus mengganggu stabilitas politik. Di samping itu, kelompok Islamis juga menghadapi masalah serius perihal krisis ekonomi dan banyaknya pengangguran, yang menyebabkan revolusi terseok-seok.

Kisah demokrasi di Libya, Yaman, Suriah jauh lebih buruk, karena negara-negara tersebut terlibat dalam friksi yang cukup serius di antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam pertarungan kekuasaan. Ketidakmampuan faksi-faksi politik mengambil langkah-langkah bersama untuk membangun konstitusi yang mencerminkan kepentingan bersama telah menyebabkan demokrasi jauh lebih buruk dari Mesir dan Tunisia.

Militer merupakan salah satu elemen penting dalam jatuh-bangun demokrasi di Mesir. Kegagalan demokrasi harus diakui tidak bisa dilepaskan dari intervensi militer dalam ranah politik praktis. Setelah jatuh dari anasir Dinasti Ottoman, pada tahun 1952 Gamal Abdul Nasser mengambilalih kekuasaan melalui kudeta militer.<sup>16</sup>

Sejak berkuasa, Nasser membubarkan parlemen, memecat seluruh elemen sipil dalam politik, dan membubarkan lembaga peradilan. Ia berhasil membuat rezim militer yang otoriter, yang didukung sepenuhnya oleh konstitusi pada masa itu. Sejak saat itu, Nasser berhasil memapankan kekuasaannya dan menerapkan politik represif terhadap kekuatan oposisi dan masyarakat sipil, khususnya Ikhwanul Muslimin. Mereka ditangkap, termasuk pimpinan mereka, Hasan al-Banna yang berakhir pada kematiannya, sedangkan organisasinya dilarang.

---

<sup>16</sup>Ellis Goldberg, “Mubarakism Without Mubarak,” *Foreign Affairs*, 11 (February 2011), 111

Di satu sisi, Nasser berhasil menanamkan ideologi sosialisme Arab dan membangun aliansi politik dengan Uni Sovyet, sebagai bentuk perlawanan terhadap Barat. Pada masa Nasser, ide-ide sosialisme dan sekularisme tumbuh subur sebagai anti-tesa terhadap islamisme. Tetapi, harus diakui, harga yang harus dibayar mahal dari kebijakan tersebut yaitu matinya demokrasi. Budaya demokrasi yang meniscayakan penyemaian keragaman pandangan dan sikap politik digantikan oleh “politik sentralistik”, yang dikendalikan sepenuhnya oleh Gamal Abdul Nasser.

Petaka politik sentralistik yang diterapkan Nasser pada akhirnya ibarat senjata makan tuan. Kekalahan perang melawan Israel 1967, telah melumpuhkan cengkramannya dalam politik. Bersamaan dengan itu, Mesir menghadapi krisis ekonomi yang cukup serius, karena besarnya belanja di bidang militer. Sepanjang tahun 1975 dan 1977 meluas revolusi yang menuntut mundurnya Nasser.<sup>17</sup> Maka, saat Nasser kalah melawan Israel dijadikan momentum untuk menggulingkan kekuasaan. Anwar Sadat melanjutkan kekuasaan Nasser.

Anwar Sadat tidak berhasil mempertahankan kekuasaannya, karena tewas di tangan kalangan Islamis, yang kecewa dengan kebijakannya berdamai dengan Israel pada tahun 1979. Determinasi militer semakin kokoh, saat Mubarak menggantikan Anwar Sadat.

Hosni Mubarak melanjutkan kebijakan pendahulunya, Gamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat. Di satu sisi, dia memperkuat barisan militer di dalam ranah politik, tetapi juga melanjutkan perdamaian dengan Israel. Kebijakan yang dilanjutkan oleh Mubarak dari pendahulunya, yaitu “darurat militer”, sehingga ia mempunyai kekuasaan absolut untuk membungkam oposisi, baik dari kubu sosialis maupun islamis.

Kekuasaan militer Mubarak semakin kokoh, saat ia menggunakan partai politik, khususnya Partai Nasional Demokrat (NDP) sebagai basis dukungan massa. Di samping itu, ia memperkuat kelas menengah, khususnya di kalangan pebisnis. Di sinilah, determinasi militer yang dilakukan Mubarak mempunyai wajah lain: demokrasi dan tumbuhnya kelas menengah.

Meskipun demikian, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa demokrasi akhirnya mati di tengah kuatnya ambisi kekuasaan kalangan militer dan keluarga Mubarak. Kebebasan politik dibungkam dan korupsi merajalela, yang menyebabkan besarnya angka buta-huruf dan pengangguran, yang menyebabkan lahirnya revolusi. Ironisnya, saat revolusi bergelayut, justru Mubarak ditinggalkan oleh kalangan militer, yang selama ini menjadi penyokong dan kekuatan utamanya dalam politik. Dalam hiruk-pikuk revolusi, kalangan militer justru berpihak kepada rakyat daripada Mubarak.

Kini, rakyat Mesir sedang dihadapkan pada kekhawatiran serupa, perihal naiknya militer ke tampuk kekuasaan. Militer yang sejatinya meangkhiri kekuasaannya pada akhir Juni 2012, tapi justru memperpanjang dominasi politiknya dengan cara membubarkan parlemen melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan, bahwa pemilu parlemen inkonstitusional karena calon independen juga diisi oleh kandidat dari partai politik,

---

<sup>17</sup>Ellis Goldberg, “Mubarakism Without Mubarak,” *Foreign Affairs*, 11 (February 2011), 112

khususnya dari kubu Ikhwanul Muslimin. Muncul kekhawatiran, bahwa militer akan melakukan kudeta, sebagaimana dilakukan Nasser. Jika itu terjadi, maka militer merupakan tantangan serius dalam membangun demokrasi di Mesir pasca-revolusi. Di sinilah pentingnya menjauhkan militer dari politik praktis dan mengembalikan mereka ke barak, terutama dalam rangka melindungi negara dari ancaman negara lain.

Jatuhnya Morsi melalui mekanisme kudeta militer dengan mandat penuh dari rakyat menimbulkan kekhawatiran baru, akankah militer masih mempunyai intensi yang kuat bagi demokratisasi di Mesir. Memberikan tampuk kepemimpinan kepada Adli Manshour, Dewan Tinggi Mahkamah Konstitusi dan menggelar Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif merupakan momentum yang dapat membuktikan apakah militer mempunyai komitmen yang kuat terhadap demokrasi. Tentu saja, komitmen tersebut sedang disorot dengan serius oleh rakyat Mesir perihal komitmen militer dalam demokratisasi.

### **Konflik Israel-Palestina**

Revolusi di Timur-Tengah juga memberikan dampak yang serius terhadap peta perdamaian Israel-Palestina. Sejak perdamaian yang ditanda-tangani Mesir dalam perundingan Camp David pada tahun 1979, relasi Israel dan Palestina telah memasuki zaman baru. Pada tahun 1993, PLO juga menandatangani perjanjian damai dengan Israel, yang menandakan berakhirnya era konflik dan lahirnya perjanjian perdamaian.

Meskipun demikian, perjanjian perdamaian tersebut tidak serta-merta mendapatkan sambutan positif dari publik Timur-Tengah. Faktanya, Israel masih melakukan pendudukan dan pembangunan rumah ilegal di Tepi Barat. Perseteruan antara Israel dengan Hamas memberikan dampak yang serius terhadap perjanjian damai, karena Israel masih menabuh gendang konflik dengan rakyat Palestina yang bermukim di Jalur Gaza. Perdamaian Israel dengan Palestina sesungguhnya hanya berlaku antara pemerintah Israel dengan Otoritas Palestina yang didukung sepenuhnya oleh Faksi Fatah, pimpinan Mahmoud Abbas, yang bermarkas di Tepi Barat.

Sementara itu, publik Timur-Tengah di akar rumput tidak percaya dengan proposal perdamaian yang ditanda-tangani Israel. Karenanya, perdamaian Israel dan Palestina sebenarnya bersifat elitis dan tidak didukung sepenuhnya oleh publik di akar rumput. Tidak hanya di Palestina, melainkan juga di dunia Arab lainnya, bahkan dunia Islam pada umumnya.

Perlawanan terhadap Israel makin mengemuka pasca-revolusi. Bahkan, Kaum muda Mesir bahkan merusak kantor Kedubes Israel di Kairo dan mendesak agar pemerintah Mesir menarik Kedubesnya di Israel. Peristiwa ini relatif baru dan mengejutkan, karena sejak perjanjian damai Camp David pada tahun 1979, Mesir menjadi mediator perdamaian Israel dan Palestina. Lembaga Riset dan Strategi Harian al-Ahram merilis, bahwa 52% mendesak pemerintahan baru pasca-revolusi agar merevisi perdamaian dengan Israel. Tewasnya tentara dan polisi Mesir di semenanjung Sinai semakin memperburuk hubungan Israel-Mesir.

Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas untuk mengajukan proposal keanggotaan di PBB. Istimewanya, proposal tersebut disambut secara positif oleh dunia internasional. Lebih dari 122 negara mendukung keanggotaan Palestina sekaligus mengakui kemerdekaan negeri terjajah tersebut. Bahkan, Palestina saat ini mendapatkan keanggotaan penuh di UNESCO PBB sebagai sinyalemen positif tentang dukungan internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Meskipun demikian, keanggotaan Palestina akan menemukan hambatan serius. Pasalnya, beberapa negara anggota DK PBB, utamanya AS, Inggris, dan Perancis akan menggunakan veto untuk menggagalkan proposal Palestina. Hanya China dan Rusia yang akan memuluskan jalan keanggotaan Palestina, sedangkan Jerman, Portugal, dan Kolombia masih belum menentukan suaranya.

Peta kekuatan politik di DK PBB menggambarkan dominasi negara adidaya dan tarik-menarik kepentingan politik yang sangat kentara di Timur-Tengah. Secara historis, tertundanya kemerdekaan Palestina disebabkan AS dan sekutunya tidak mempunyai kehendak politik untuk mengambil kebijakan yang memihak kepentingan rakyat Palestina. Sebagaimana dimaklumi, jika dihadapkan pada kepentingan Israel, kebijakan politik luar negeri AS dengan mudah bisa ditebak. Kuatnya lobi Yahudi di kongres AS disebut-sebut sebagai salah satu faktor utamanya. Meskipun kebijakan tersebut merugikan kepentingan AS di Timur-Tengah dan dunia Islam pada umumnya, AS tidak akan bisa memalingkan keberpihakannya pada Israel.

Ada tiga faktor pengajuan proposal keanggotaan yang diinisiasi Palestina. Pertama, pihak otoritas Palestina memandang AS tidak mampu menjadi mediator dan pemberi garansi kemerdekaan Palestina. Perundingan Israel-Palestina yang dimediasi AS kerap kali tidak memberikan hasil yang memuaskan Palestina. Pembangunan ilegal Israel di kawasan Tepi Barat dan Jerusalem Timur, yang secara *de jure* melanggar perdamaian Oslo 1993, tidak mampu diredam AS dan sekutunya. Bahkan, pihak Israel mampu menekan Obama melalui kongres agar AS tidak memaksa Israel untuk membekukan pembangunan ilegal tersebut. Akibatnya, perundingan perdamaian Israel-Palestina mengalami kebuntuan.

Kedua, momentum revolusi Arab. Jatuhnya Hosni Mubarak, yang selama ini menjadi mediator AS dengan negara-negara Timur-Tengah semakin menambah kepercayaan diri Palestina untuk memulai kembali perundingan tentang kemerdekaan Palestina. Mesir pasca-Hosni Mubarak akan menjadi berkah politik bagi Palestina, karena siapapun yang terpilih dalam pemilu nanti akan membawa mandat politik dari rakyat, yang secara umum mendukung kemerdekaan Palestina dan anti-Israel. Bahkan, mayoritas rakyat Mesir telah menabuh “perang” melawan Israel pasca-tewasnya tentara dan polisi di Semenanjung Sinai, pada tanggal 19 Agustus 2011, yang disertai pengusiran diplomat Israel dari Mesir. Perjanjian Camp David dituntut untuk ditinjau ulang, karena selama ini hanya menguntungkan pihak Israel.

Ketiga, dukungan politik Turki. Hubungan Israel dan Turki juga memasuki masa-masa yang disharmonis. Setelah Israel menolak meminta maaf atas tragedi rombongan

bantuan kemanusiaan Turki ke Gaza, Turki menegaskan sikapnya: melawan Israel. Turki, secara eksplisit, menjadikan momentum tersebut untuk mengepung Israel melalui isu kemerdekaan Palestina. Israel lupa, bahwa kebijakan politik luar negara AS yang kerap kali menguntungkan mereka selama ini tidak lain karena didukung sepenuhnya oleh Turki. Tapi, sikap Israel yang biadab terhadap warga Turki mengakibatkan hubungan diplomatik di antara kedua negara tersebut dalam kondisi yang memanas.

Maka dari itu, sikap politik yang diambil Mahmoud Abbas menemukan momentumnya. Palestina mencari alternatif lain dalam mewujudkan kemerdekaan negerinya, di luar medium AS yang sudah terbukti mengalami kegagalan. PBB dianggap sebagai medium yang tepat melanjutkan perundingan tentang kedaulatan politik Palestina pasca resolusi 242, yang mengakui pemerintahan otoritas Palestina dan mengakhiri pendudukan militer, baik di Palestina maupun di Israel.

Bagi AS, sikap tersebut sama sekali tidak menguntungkan secara politis, karena AS akan distigmakan sebagai sumber masalah penjajahan Israel atas Palestina dalam enam dekade terakhir. Secara khusus, kepercayaan dunia Islam terhadap Obama akan semakin pudar, karena sejak awal pemerintahannya Obama berjanji untuk mengakui kemerdekaan Palestina dengan mengacu pada teritori wilayah 1967. Tapi faktanya, AS menjadi pengganjal utama bagi keanggotaan Palestina di PBB. Obama memimpin langsung upaya AS untuk menghambat langkah politik Palestina.

Selain faktor AS dan sekutunya yang menjadi penghambat keanggotaan Palestina, faktor friksi kepentingan dalam negeri Palestina menarik untuk dicermati dengan saksama. Faktanya, proposal Mahmoud Abbas tidak hanya ditentang AS dan sekutunya, tetapi juga faksi Hamas. Tidak seperti Abbas yang berlatarbelakang Fatah dan cenderung akomodatif dengan kepentingan AS dan sekutunya, Hamas sejak awal sudah mencium dan berpandangan keras terhadap AS dan sekutunya. Bagi Hamas, segala perundingan dengan AS dan sekutunya hanya menguntungkan Israel. Padahal Israel merupakan musuh bersama (*common enemy*) yang telah menjajah Palestina sejak 1948 hingga sekarang.

Hamas berpandangan, kemerdekaan Palestina harus sejalan dengan delegitimasi Israel. Israel adalah sumber penderitaan rakyat Palestina, dan karenanya Israel harus mendapatkan sanksi atas tindakannya. Sikap Hamas ini didukung sepenuhnya oleh Hizbullah di Lebanon, Iran, dan Suriah.

Maka dari itu, agenda menuju kemerdekaan dan kedaulatan Palestina bukanlah hal yang mudah. Masalah yang dihadapi di dalam internal Palestina tidak kalah rumitnya dengan dukungan politik dari dunia internasional. Dalam hal ini, kekuatan AS dan sekutunya tentang ancaman Palestina terhadap Israel dapat dimaklumi, karena Hamas tidak satu paket dengan proposal yang diajukan Mahmoud Abbas. Bahkan, Hamas cenderung menolak setiap perundingan perdamaian yang direpresentasikan Abbas.

Dengan demikian, rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah menjadi agenda yang harus diutamakan pasca-pemilihan di Majelis Umum PBB. Rakyat Palestina harus melakukan

konsensus perihal sikap politik terhadap Israel. Jika mereka memutuskan dapat menerima Israel sebagai negara berdaulat, khususnya Hamas, maka hal tersebut akan memudahkan jalan menuju perdamaian dan pengakuan dari AS dan sekutunya. Tetapi, bila langkah tersebut tidak dicapai, maka konflik Israel-Palestina akan mengalami jalan buntu.

Konflik Israel-Palestina akan menjadi isu yang terus menghangat di Timur-Tengah. Di tengah situasi politik yang karut-marut dan tantangan ekonomi akibat menurunnya harga minyak internasional, maka isu kemerdekaan Palestina akan terbengkalai. Di satu sisi, Israel terus melakukan politik pendudukan dan penjajahan terhadap Palestina. Sementara Palestina terus dihadapi pada masalah konflik internal di antara berbagai faksi di dalam negeri dan hilangnya perhatian negara-negara Timur-Tengah terhadap Palestina.

### Globalisasi Terorisme

Pasca-tragedi berdarah, 11 September 2001 di Menara Kembar World Trade Center, New York, Timur-Tengah merupakan kawasan yang disorot oleh dunia internasional. Al-Qaeda divonis sebagai biang keladi dari aksi yang mematikan itu. Sebagai balasannya, AS menerapkan kebijakan keras terhadap al-Qaeda dan jaringannya, khususnya di Timur-Tengah. Salah satu kebijakan luar negeri AS diambil untuk menggulingkan rezim Saddam Husein, karena diduga melindungi kalangan teroris. Karenanya, aliansi AS dengan rezim-rezim diktator di Timur-Tengah dibangun di atas prinsip “melawan jaringan terorisme al-Qaeda”.

Akar-akar merebaknya terorisme di Timur-Tengah bermula pada tahun 1998, tatkala Osama bin Laden meluncurkan sebuah maklumat, *Al-Jabhah al-Islamiyyah li al-Jihad 'ala al-Yahud wa al-Shalibiyyin*. Secara eksplisit, maklumat tersebut berisi fatwa kepada setiap kaum muslimin untuk memerangi orang-orang Yahudi dan Kristen di mana pun mereka hidup. Bagi Bin Laden, keterbelakangan kaum muslimin di dunia ketiga disebabkan para kolonial yang menganut Yahudi dan Kristen. Secara khusus, Bin Laden menyebut AS dan sekutunya sebagai musuh umat Islam. Maklumat tersebut berhasil melancarkan serangan ke Kedutaan Besar AS di Kenya dan Tanzani pada tahun 1998. Puncaknya, maklumat Bin Laden berhasil menghancurkan menara kembar WTC di New York.<sup>18</sup>

Selain itu, sejumlah ulama di Arab Saudi juga mengeluarkan fatwa serupa, terutama dalam rangka mendukung perlawanan Taliban di Afghanistan untuk melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Hammoud bin Aqla al-Shu'aibi yang mengeluarkan fatwa “jihad” melawan Amerika Serikat dan sekutunya, yang kerap kali menguasai kawasan Timur-Tengah.

---

<sup>18</sup>Ahmad Moussali, *Wahhabism, Salafism, and Islamism: Who is the Enemy*, A Conflict Forum Monograph, (Januari, 2009), hlm 10.

Tidak hanya itu, fatwa juga berisi perang melawan kaum muslimin yang mendukung kepentingan “orang-orang kafir”.<sup>19</sup>

Bahkan, ironisnya Abu al-Barra' al-Najdi menulis sebuah buku *al-Kawashif al-Jaliyya fi Kufr al-Dawla al-Sa'udiyya*. Buku ini berisi tentang kekufuran kerajaan Arab Saudi, keluarga, dan mereka yang mengikuti perintah Raja. Al-Barra' al-Najdi dikenal sebagai ulama Wahabi yang keras mengkritisi pemerintah Arab Saudi, karena dalam pandangannya saat ini negaranya dipimpin oleh orang-orang kafir. Ia secara eksplisit menegaskan, agar Arab Saudi dikeluarkan dari keanggotaannya di Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada orang-orang Arab Saudi yang ikut serta berperang di Afghanistan dan kembali ke negaranya untuk mengkritik para pemimpin Arab Saudi yang dianggap melenceng dari misi kebenaran dan keadilan.<sup>20</sup>

Terorisme yang berkecambah di Timur-Tengah didukung oleh Wahabisme.<sup>21</sup> Paham ini merupakan paham yang memberikan inspirasi bagi gerakan-gerakan terorisme kontemporer, terutama dalam mencuci otak “para pengantin” yang rela menebarkan “bona bunuh diri” di sejumlah negara. Sebagai sebuah paham, Wahabisme mengalami pengembangan yang luas, karena mempunyai konteks sosial-politik dan sosial-ekonomi yang memungkinkan paham tersebut berkelana dari satu negara ke negara yang lain, terutama jika mempunyai problem ideologi dan kepentingan politik yang sama. Edward W. Said mengenalkan “travelling theory”, yang dapat menjelaskan bahwa sebuah teori atau paham dapat berkelana dan mengembara sesuai dengan konteks sosial-politik masyarakat.

Ada faktor-faktor lain yang juga menjadi penyebab munculnya radikalisme, seperti ketidakadilan ekonomi dan politik rezim otoriter serta kolonialisme yang diprakarsai AS dan sekutunya di Timur-Tengah. Namun, harus diakui bahwa Wahabisme mempunyai peran yang sentral untuk membangkitkan gairah bagi gerakan-gerakan radikal, terutama dalam rangka mempengaruhi publik dan mencari justifikasi teologis. Amartya Sen dalam *Identity and Violence* mempunyai pandangan yang menarik untuk dipertimbangkan, bahwa kekerasan bersumber dari munculnya keyakinan tentang identitas soliter. Kaum muslimin mempunyai afiliasi identitas yang beragam, sesuai dengan konteks sosial-politik, tetapi kalangan radikal

---

<sup>19</sup>Yang menarik dari fatwa tersebut, bahwa fatwa jihad yang semula hanya menabuh gendang perlawanan terhadap Barat, tetapi juga merambah pada orang-orang Muslim yang menjalin persahabatan dengan Barat. Fatwa ini terlihat sangat aneh, karena tidak hanya menjadikan orang-orang Barat sebagai target jihad tetapi juga kalangan Muslim. Lihat Harian al-Safir, 15 Oktober, 2001.

<sup>20</sup>Abu Barra al-Najdi, *Al Kawashif al-Jaliyyah fi Kufr al-Dawla al-Sa'udiyya*, (London: Dar al-Shafa' 1994). Lihat juga pandangan Muhammad Assem al-Makdessi dalam *Democracy as a Religion*, yang menganggap sistem demokrasi yang diterapkan secara terbatas di Arab Saudi sebagai sistem yang *kufr* dan *syirk*.

<sup>21</sup>Tesis ini dianut oleh beberapa pemerhati gerakan-gerakan ekstremis kontemporer, baik di Barat maupun dunia Islam. Di antaranya Khaled Abou el-Fadl dalam *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*; Zubair Qamar dalam *Wahhabism: Understanding the Roots and Role Models of Islamic Extremism*; Bin Abdul Wahab Sulaeman, *Fasl al-Khithab fi Radd 'ala Muhammad bin Abd al-Wahhab*.

telah memilih identitas tunggal untuk membenarkan tindakan kekerasan, sebagaimana dilakukan oleh Osama bin Laden dan para pengikutnya.

Sebenarnya secara paradigmatik, wahabisme tidak mempunyai kekuatan argumentatif. Tetapi, pada tahun 1975, Arab Saudi yang kaya minyaknya mempunyai amunisi yang sangat besar untuk mentransmisikan Wahabisme ke seluruh penjuru dunia. Mereka menggunakan modus pembangunan masjid dan penerbitan buku-buku yang ditulis oleh Muhammad bin Abd al-Wahhab, dan pengikutnya, seperti Muhammad bin Baz, mufti Arab Saudi.

Pada mulanya, kalangan Wahabi membentuk organisasi yang dikenal dengan Liga Muslim Dunia (*Rabithat al-'Alam al-Islami*). Melalui lembaga inilah, mereka memberikan beasiswa kepada dunia Islam untuk belajar di Arab Saudi atau mereka mendirikan lembaga pendidikan yang mana kurikulum dan para dosennya didatangkan langsung dari Arab Saudi. Selain itu, mereka membangun sejumlah masjid, menyediakan dana untuk penerjemahan dan penerbitan al-Quran, serta menyebarkan buku-buku dan majalah yang ditulis oleh para ulama dari kalangan Wahabi. Mereka melakukan ekspansi ideologis ke sejumlah negara di Timur-Tengah, seperti Mesir, Yaman, Suriah, Libanon, dan Libya.

Harus diakui, program-program yang dicanangkan oleh kalangan Wahabi relatif berhasil, karena mereka tidak hanya menyebarkan pemikiran, tetapi juga menciptakan para ulama, bahkan politisi yang menyampaikan dakwah setiap saat kepada kaum muslimin. Bahkan, di antara mereka menempati posisi penting di lembaga-lembaga agama sehingga tidak heran jika fatwa-fatwa keagamaan juga diinspirasi oleh nalar kaum Wahabi.

Meskipun demikian, para Wahabisme tidak selalu elok, karena dalam realitasnya masih banyak penentangan, baik oleh kalangan Wahabi maupun Non-Wahabi. Sebagian kalangan Wahabi menolak untuk diasosiasikan dengan penganut Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab, karena sesungguhnya apa yang mereka yakini merupakan paham "Islam yang paling benar", bukan paham Muhammad bin 'Abd al-Wahhab. Di kalangan Non-Wahabi, sudah pasti mendapatkan penolakan dan penentangan yang serius, karena sebagian besar kaum muslimin adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah yang mempertahankan tradisi ziarah kubur, menganut sufisme, dan beradaptasi dengan kebudayaan lokal. Maka dari itu, hampir di setiap dunia Islam, Wahabisme hampir menjadi *common enemy*.<sup>22</sup>

Munculnya penentangan yang begitu kuat tersebut, menyebabkan Wahabisme menggunakan "wajah baru" dengan menggunakan terma "salafisme" sebagai baju baru. Dua tokoh salafisme yang paling menonjol yaitu Abu al-A'la al-Mawdudi dan Sayyed Quthb. Doktrin kembali kepada masa keemaasan Islam, konsep "Jahiliyya", dan puritanisme Islam menjadi tema yang paling mengemuka dalam gerakan mereka. Pada tahun 70-an, ada

---

<sup>22</sup>Di Mesir, para ulama al-Azhar menentang keras Wahabisme. Di antaranya Grand Syaikh al-Azhar, Syaikh al-Bahi, Syaikh Muhammad al-Ghazali, Muhammad Yusuf al-Qaradawi, dan lain-lain.

beberapa sosok “Wahabi-Salafi”, seperti Salih Saraya (w.1975), Syukri Mustafa (w. 1978) dan Muhamnad Abd Salam Faraj (w.1982).<sup>23</sup>

Saat ini, Arab Saudi sendiri sudah melakukan reformasi besar-besaran untuk mengamputasi dan menetralsir paham Wahabi, karena mereka memandang Wahabisme tidak hanya berbahaya bagi dunia internasional, tetapi juga bagi Arab Saudi sendiri. Kini, Wahabisme ibarat senjata makan tuan, karena menganggap Kerajaan Arab Saudi sebagai *kafir*. Mereka berencana beberapa kali untuk melakukan kudeta, meskipun selalu gagal, karena kekuatan mereka sangat terbatas.

Sebelum revolusi, kaum salafi yang menganut ideologi wahabisme dikenal sebagai gerakan *underground*. Tapi, pasca-revolusi yang membentangkan jalan bagi kebebasan berserikat dan berpendapat, mereka mulai tampil sebagai kekuatan politik. Di Mesir, mereka mendirikan Partai Al-Nour, yang secara khusus mengusung ideologi “kembali kepada al-Quran dan Sunnah” dengan proposal “formalisasi Syariat”. Di dalam pemilu putaran pertama, mereka berhasil mendulang suara sekitar 25%.

Institusionalisasi wahabisme dan salafisme dalam partai politik merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati. Di satu sisi, keterlibatan mereka dalam politik praktis dapat menjadi katalisator agar mereka lebih realistis dan pragmatis dalam memahami kondisi objektif masyarakat. Tetapi di sisi lain, ada kekhawatiran mereka cuman menjadikan demokrasi sebagai prosedur untuk mencapai visi dan misi mereka dalam formalisasi agama. Sementara substansi demokrasi, seperti kesetaraan, kedamaian, dan keadilan cenderung diabaikan.

Memang terlalu dini untuk menyimpulkan identitas dan karakter kaum salafi di panggung politik pasca-revolusi. Tetapi, keterlibatan mereka dalam politik praktis menimbulkan tanda-tanya, karena di masa lalu mereka mengafirkan Ikhwanul Muslimin dan cenderung mengharamkan demokrasi. Pasca-revolusi, mereka justru mendirikan partai politik dan mendapatkan suara yang lumayan signifikan, yang memungkinkan mereka untuk berperan di ruang publik secara terbuka untuk mengembangkan ideologinya.

Di samping itu, angin revolusi yang berembus di Timur Tengah menghasilkan sesuatu yang kontradiktif dengan tuntutan revolusi: demokrasi, keadilan sosial, dan keadaban. Di Suriah dan Irak, angin revolusi menjelma menjadi sebuah gerakan yang menginisiasi terbentuknya “negara Islam”, yang dikenal dengan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Negara Islam ini direncanakan dapat diwujudkan di Irak dan Suriah.

Di Suriah, ISIS menjelma dalam gerakan perlawanan terhadap rezim Bashar al-Assad. Di tengah gonjang-ganjing politik, mereka menggunakan momentum revolusi sebagai kendaraan untuk memuluskan misi mendirikan negara Islam. Begitu pula di Irak, ISIS menjadi kelompok jihadis yang dipersenjatai layaknya militer.

---

<sup>23</sup>Khaled Abou el Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, (New York: HarperCollins Publisher, 2005), hlm. 74.

Saat ini ISIS menjadi bahan perbincangan di dunia internasional karena menjadi antitesis revolusi. Bahkan ISIS dianggap lebih berbahaya ketimbang Al-Qaidah karena mempunyai ribuan personel pasukan perang, yang siap mendeklarasikan perang terhadap mereka yang dianggap bertentangan atau menentang berdirinya negara Islam.

ISIS didirikan pada April 2013 oleh Abu Bakar al-Baghdadi asal Samarra, Irak utara. Mereka terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap Amerika Serikat sejak melakukan invasi pada 2003. Pada 2010, Al-Baghdadi dikabarkan menjadi pemimpin Al-Qaidah di Irak.

Kalangan muda di Irak dan Suriah kepincut terhadap ISIS karena memandang ISIS sebagai gerakan yang berorientasi pada perang dan perlawanan dengan menjadikan heroisme keagamaan sebagai pemantiknya.

Gerakan revolusi yang mulanya mempunyai misi mulia, yakni menggulingkan rezim otoriter, belakangan berubah menjadi tragedi. ISIS menjadi sebuah kekuatan baru yang siap melancarkan perlawanan sengit terhadap rezim yang berkuasa yang dianggap tidak mampu mengemban misi terbentuknya negara Islam. Ironisnya, mereka mengabsahkan kekerasan untuk menindas kaum minoritas dan menyerang rezim yang tidak sejalan dengan paradigma negara Islam.

Hingga saat ini, ISIS mempunyai pasukan dari Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa negara Eropa, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Arab lainnya. Bahkan kelompok ini telah mendeklarasikan khilafah islamiyyah, dengan menjadikan Irak dan Suriah sebagai basis kekuatan utama. Di Suriah, mereka berhasil menduduki Kota Raqqa. Sedangkan di Irak kelompok ini menggunakan momentum pertarungan kaum Sunni dengan Syiah di Fallujah, bagian barat Provinsi Al-Anbar. Bahkan mereka dikabarkan telah menguasai Kota Ramadi, perbatasan yang dekat dengan Turki dan Suriah.

ISIS menjadi bahan pembicaraan di seantero dunia Arab, bahkan dunia Islam. Mereka menjadi kekuatan politik baru yang siap melancarkan serangan yang jauh lebih brutal daripada Al-Qaidah. Sementara Al-Qaidah dikenal sebagai kelompok bawah tanah, yang pergerakannya cenderung tidak diketahui publik, ISIS menjadi kekuatan politik riil dengan ideologi yang jelas dan wilayah yang diduduki dengan cara-cara kekerasan.

Dunia memberikan perhatian khusus terhadap ISIS, khususnya Amerika Serikat. Secara pelan tapi pasti, mereka berhasil menguasai kota-kota penting di Irak dan Suriah. ISIS menjadi pusat episentrum dari gerakan-gerakan militan. Di samping itu, kelompok ini mempunyai sokongan dana yang lumayan besar dari para taipan minyak negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi dan Kuwait.

Pada mulanya, ISIS menjadikan perlawanan terhadap Bashar al-Assad di Suriah sebagai tujuan utama. Namun, belakangan, mereka mempunyai agenda yang jauh lebih besar daripada sekadar menggulingkan rezim otoriter Suriah, yang telah berkuasa lebih dari delapan dekade. Mereka ingin membangun mimpi lama: glorifikasi khilafah islamiyyah.

Dalam perjalanannya, ISIS berhasil menguasai ladang minyak di wilayah timur

Suriyah. Bahkan kelompok ini menjual minyak ke pemerintah Suriyah. Saat ini mereka dipercaya mempunyai sumber dana yang berlimpah, sehingga mampu menguasai Kota Mosul, bagian utara Irak.

Meskipun demikian, posisi ISIS tidak mudah. Mereka menghadapi dua tantangan serius. Pertama, tantangan dari dalam kelompok ekstremis dan radikal. Relasi antara ISIS dan Front Al-Nusra serta Al-Qaidah dikabarkan tidak baik. Kelompok ini, yang mulanya hanya menguasai wilayah Irak, belakangan merambah wilayah Suriyah. Karena itu, mereka mendapatkan perlawanan yang kuat dari Front Al-Nusra, yang tidak mau basisnya dikuasai pihak lain. Al-Qaidah pun tidak rela ISIS melebarkan sayap kekuatannya di Suriyah.

Kedua, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mulai khawatir terhadap kehadiran ISIS karena tidak tertutup kemungkinan akan memukul balik negara-negara Barat. Harus diakui, ISIS secara ideologis tidak berbeda dengan Al-Qaidah di Afganistan. Kelompok ini mulanya adalah kekuatan garda depan yang dilatih Amerika Serikat untuk melawan Uni Soviet, tetapi belakangan justru menjadi batu sandungan serius bagi Amerika.

Karena itu, fenomena ISIS menyimpan dilema yang cukup serius. Jika tidak diantisipasi dengan serius, ISIS akan menjadi “negara” dalam negara, yang akan menggunakan instabilitas sebagai pintu masuk untuk semakin memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. ISIS akan menjelma menjadi kekuatan politik tidak terbandung.

Kegagalan negara-negara Barat memastikan stabilitas politik di Irak dan Suriyah akan menjadi amunisi yang empuk bagi ISIS untuk mengambil alih kekuasaan dari rezim yang semakin rapuh. Apalagi negara-negara Barat ditengarai terlibat dalam pengiriman senjata terhadap ISIS.

Amerika Serikat pun sekarang berada dalam dilema yang cukup serius. Di satu sisi Amerika Serikat ingin rezim Bashar al-Assad ditumbangkan. Tapi, di sisi lain, menyokong ISIS akan melahirkan dilema lain, yaitu menguatnya ekstremisme di Timur Tengah. Otoritarianisme politik dan otoritarianisme agama merupakan musuh bagi demokrasi dan tegaknya hak asasi manusia.

Pada akhirnya, Liga Arab harus mengambil sikap yang tegas terhadap ISIS. Mesir, sebagai negara yang relatif stabil secara politik, setelah terpilihnya Al-Sisi, harus mengambil langkah-langkah untuk menetralkan jejaring ISIS. Anggota ISIS harus disentuh dengan deradikalisasi, sebagaimana berhasil dilakukan oleh Al-Azhar sebagai corong moderasi Islam di dunia Arab. Mereka tidak bisa diperangi dengan senjata, melainkan dengan ideologi, yang dapat memperkuat solidaritas kebangsaan dan kemanusiaan. Mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, tapi dunia Arab mempunyai pengalaman bagus dalam melakukan deradikalisasi.

## **Kesimpulan**

Secara umum dapat dinyatakan, bahwa masa depan Timur-Tengah pasca-revolusi akan banyak menimbulkan kejutan, yang secara eksplisit dapat mengubah tesis demokrasi di

Timur-Tengah sebagai *exceptionalism*. Artinya, demokrasi tidak kompatibel dengan keyakinan dan tradisi yang berkembang di Timur-Tengah.

Badai revolusi yang menyapu bersih rezim-rezim otoriter di Timur-Tengah telah mengabarkan sebuah realitas baru yang meruntuhkan tesis-tesis para pakar Islam dan demokrasi, bahwa sebenarnya orang-orang Arab tidak alergi dengan demokrasi. Mereka dapat menerima demokrasi dengan baik, bahkan menjadikan demokrasi sebagai sistem yang memungkinkan transformasi sosial, politik, dan ekonomi.

Namun tantangan yang harus dihadapi, yaitu tampilnya kaum Islamis dalam panggung demokrasi. Bangkitnya kaum Islamis akan memberikan dampak yang besar secara global. Di satu sisi, kelompok Islamis di dunia Islam akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk bekerja secara maksimal di dalam ranah politik praktis. Tetapi di sisi lain, keterpurukan Ikhwanul Muslimin akan memberikan dampak psikologis yang sangat memilukan, karena kemenangan politik di dalam pemilu harus berakhir dengan kejatuhan yang amat memilukan, setelah munculnya perlawanan yang kuat dari kubu nasionalis-sekuler. Fakta tersebut telah menyebabkan militer melakukan kudeta.

Perdamaian Palestina akan menjadi isu sentral yang akan menarik perhatian pasca-revolusi. Isu Palestina merupakan isu yang sangat sensitif, karena mempunyai dampak yang riil bagi keamanan global. Kelompok ekstremis dan teroris kerap kali menjadikan isu Palestina sebagai pemantik untuk membangkitkan perlawanan terhadap Barat. Jika Amerika Serikat gagal dalam mengambil langkah kompromi dengan rezim-rezim demokratis pasca-revolusi, maka akan terjadi krisis politik yang sangat luar biasa dan akan mengganggu stabilitas politik di Timur-Tengah. Rumitnya persoalan ini akan memastikan, mana yang lebih relevan antara rezim otoriter atau rezim demokratis. Sejarah yang akan membuktikan!

Puncaknya, globalisasi terorisme akan menjadi ancaman yang serius. Fenomena al-Qaeda dan ISIS akan menjadi isu yang paling krusial, karena ISIS tidak hanya berkembang di Irak dan Suriah, melainkan juga di sejumlah negara-negara Islam. Bahkan, ISIS berhasil merekrut anggota dari negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Kelompok-kelompok ekstremis di berbagai penjuru dunia pun telah berbaiat menjadi bagian dari ISIS.

Dengan demikian, dinamika politik di Timur-Tengah Pasca-Revolusi akan menimbulkan dampak yang serius bagi keamanan global. Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan dari infiltrasi paham dan gerakan yang muncul di Timur-Tengah. Tidak hanya itu, Indonesia diharapkan bersifat proaktif untuk mengambil peran-peran diplomatik, terutama meyakinkan Timur-Tengah agar memilih jalan demokrasi dengan landasan konstitusi yang dapat menyuburkan demokrasi.

## Daftar Pustaka

Abou el Fadl, Khaled. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremist*, New York: HarperCollins Publisher, 2005.

Al-Eryan, Esham. *Al-Ikhwān al-Muslimūn wa al-Dawla al-Madaniyyah*, Kairo: al-Markaz al-ʿIlām al-ʿArabi, 2011.

Al-Kawakibi, Abdurrahman. *Thabaʿiʿ al-Istibdad wa Mashariʿ al-Istiʿbad*, Damaskus: al-Awail, 2003.

Armanjani, Jon. *Modern Islamist Movement: History, Religion, and Politics*, United Kingdom: Willey Blackwell, 2012.

Muhammad bin Khaldun, Abdurrahman bin. *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Beirut: al-Maktabah al-ʿAshriyah, 1995.

Layachi, Azzedine. *Global Studies: The Middle East*, New York: McGraw-Hill, 2011.

Wickham, Carrie Rosefsky. *Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt*, New York: Colombia University Press, 2002.